



“Tema: 2 (pengelolaan wilayah kelautan, pesisir dan pedalaman)”

**PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
SEBUAH BUKTI UNTUK MEREDUKSI KEMISKINAN
MASYARAKAT PESISIR DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh

**Dr. Riyanto, Pranyoto, S.Pi., MAP., Capt. Karolus Geleuk Sengadji MM., RAJ
Susilo Hadi Wibowo**

**PIP Semarang Jl. Singosari No. 2A Semarang
mangunriyanto@gmail.com, pranyoto.pran84@gmail.com, Karolus.capt@gmail.com,
Ray.susilo@yahoo.com**

ABSTRAK

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara atau pemerintah adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin karena pada hakekatnya suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Di Indonesia, strategi pembangunan diprioritaskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan sejalan dengan amanat GBHN bahwa arah dan tujuan pembangunan nasional harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan hasil yang dicapai harus dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait bagaimana mengurangi angka kemiskinan yang ada di wilayah pesisir Jawa Tengah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP), dengan menggunakan metode kualitatif dan desain Teknik Analisa data deskriptif sampel diambil di beberapa wilayah pesisir Jawa Tengah. Hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Dalam tataran konsep, PEMP telah memenuhi strategi mata pencaharian dan strategi permodalan untuk memutus rantai kemiskinan. Namun PEMP kurang mendapat perhatian dalam strategi makro, karena sektor kelautan dan perikanan belum menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan nasional. Dalam tataran praktis, beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu merubah persepsi nelayan tentang makna bantuan, meningkatkan kapasitas sasaran dalam manajemen dan administrasi keuangan, sinkronisasi antara berbagai program pemberdayaan, serta penyesuaian program dengan kultur setempat yang sangat bersifat lokalitas.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Masyarakat Pesisir, Pemberdayaan Masyarakat, Mereduksi, Jawa Tengah.*

ABSTRACT

One indicator of the success of the economic development of a country or government is the reduction in the number of poor people because in essence a development is to improve the welfare of the community fairly and evenly. This is in accordance with Article 27 of the 1945 Constitution that the poor and neglected children are cared for by the state. In Indonesia, the development strategy is prioritized on the equitable distribution of development results in line with the mandate of the GBHN that the direction and objectives of national development must be utilized for improving people's



welfare and the results achieved must be enjoyed equally by all people. The development objectives are closely related to efforts to reduce poverty and income inequality. This study aims to provide an overview related to how to reduce poverty in the coastal regions of Central Java through economic empowerment of coastal communities (PEMP), using qualitative methods and design of descriptive data analysis techniques. Samples were taken in several coastal areas in Central Java. The results of the study obtained the following results: At the concept level, PEMP has fulfilled livelihood strategies and capital strategies to break the poverty chain. But PEMP has received less attention in the macro strategy, because the marine and fisheries sector has not yet become an important consideration in national policy. On a practical level, several things need to be improved, namely changing the fishermen's perceptions about the meaning of aid, increasing the target capacity in financial management and administration, synchronizing between various empowerment programs, and adjusting the program with the culture that was very local in nature.

Key words: Poverty, Coastal Communities, Community Empowerment, Reducing, Central Java.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kekayaan alam Indonesia terutama Kawasan perairan atau laut yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sangat luas jadi tidak mengherankan, jika bangsa Indonesia mengandalkan laut sebagai jaminan kelangsungan hidupnya. Mengingat perairan Indonesia yang membentang tiga perempat dari seluruh wilayah kekuasaannya kaya akan berbagai sumberdaya baik hayati maupun non hayati. Dengan garis pantai terpanjang di dunia sebesar 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508, Indonesia memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi devisa 82 miliar dolar AS dari laut setiap tahunnya. Namun, merupakan sebuah ironi ketika realita yang ada mengisyaratkan bahwa kehidupan 90 persen atau sekitar 14,48 juta nelayan tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Daerah-daerah pesisir pada umumnya merupakan kantong-kantong kemiskinan dengan situasi lingkungan yang kumuh. Secara sosial dan politik, mereka merupakan kelompok yang ditempatkan pada posisi marginal. Secara ekonomi pun mereka tergolong the poorest of the poor. as, maka citra tentang kemiskinan melekat pada kehidupan nelayan. Citra kemiskinan nelayan itu sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, lebih luas daripada wilayah darat. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya. Kondisi yang dialami nelayan tentunya sangat memprihatinkan, karena nelayan merupakan ujung tombak pengelola perikanan di Indonesia. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan di daratan akan dirasakan semakin sempit, maka matapencarian sebagai nelayan diharapkan menjadi tumpuan harapan di masa depan. Untuk itu di masa depan masyarakat secara berangsur-angsur diharapkan



terdorong untuk mengalihkan kegiatan ekonominya ke arah laut. Adanya kemiskinan yang dialami oleh nelayan, pengalihan kegiatan ekonomi ke laut dikhawatirkan sulit terjadi, sebab para anak nelayan pun dikhawatirkan tidak tertarik lagi untuk menekuni pekerjaan kenelayanan. Jika hal itu terjadi, maka kegiatan di darat akan semakin padat, sedangkan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi akan terabaikan. Akibatnya potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya akan sia-sia. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji tentang pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir dari tinjauan program pemberdayaan ekonomi pesisir, diharapkan dengan tindakan ini sector perikanan mampu berkontribusi untuk mereduksi angka kemiskinan di wilayah pesisir Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan metode kualitatif desain ini dipilih dengan tujuan untuk mengkaji dalam lingkup pemahaman terkait bagaimana sector perikanan mampu berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir Jawa Tengah, sampel diambil di beberapa tempat atau wilayah pesisir yang ada di Jawa Tengah meliputi Cilacap, Tegal, Pekalongan dan Kendal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMP: Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Masa Kini?

PEMP diluncurkan pada tahun 2001 yang berakhir tahun 2009. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperkuat lembaga dan juga partisipasi masyarakat, optimalisasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan khususnya mencakup pengurangan dampak kenaikan BBM, membuat pekerjaan dan peluang usaha alternatif bagi masyarakat pesisir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, memperkuat lembaga ekonomi, mendukung mekanisme manajemen pengembangan masyarakat dengan partisipasi dan transparansi serta meningkatkan kemampuan petugas dan penduduk pesisir dalam rangka pengelolaan pembangunan di daerah mereka. Adapun sasaran dari program ini adalah pertama, pengurangan dampak kenaikan harga BBM, melalui peningkatan pendapatan dari peningkatan usaha dan menciptakan kesempatan kerja. Kedua, pembentukan kegiatan ekonomi produktif berbasis sumberdaya laut yang berkelanjutan ditingkat masyarakat yang lebih rendah. Ketiga, proses belajar dan partisipasi dibentuk sebagai upaya untuk memberdayakan komunitas komunitas lokal. Keempat, Pembentukan Lembaga Ekonomi Mikro di Komunitas pesisir (LEPP-M3). Jika kita melihat teori kemiskinannya Chambers, maka sasaran program PEMP di atas merupakan pengejawantahan langkah-langkah yang ditawarkan Chambers agar keluar dari



deprivation trap yaitu: 1. Umumnya masyarakat miskin menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan satu sumberdaya yang rentan terhadap krisis sehingga mereka harus didorong untuk mampu melakukan diversifikasi usaha dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang produktif. Upaya ini selain dapat menjaga stabilitas pendapatan masyarakat miskin juga dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap kelas sosial di atasnya serta dapat memperluas posisi tawarnya. Memberikan fasilitas pembiayaan usaha untuk masyarakat miskin yang tidak bankable dengan sistem bagi hasil dan pelatihan manajemen keuangan yang baik. 3. Pemberantasan korupsi yang terkait dengan perampasan hak-hak orang miskin. 4. Pemerataan distribusi keuntungan yang adil dalam suatu rantai produksi.

PEMP: Sebuah Upaya Pemberdayaan?

Berbeda dengan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pada jaman orde baru yang lebih menitik beratkan pada kegiatan padat karya, di era reformasi upaya tersebut dilakukan dengan pendekatan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, selain untuk mengentaskan kemiskinan juga berusaha menciptakan sebuah masyarakat yang berdaya yang mampu mengatasi permasalahan dengan kemampuannya sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi (Moeljarto, 1996).

Membangun Institusi dengan Partisipasi: Sebuah Konsep yang humanis.

Keberadaan institusi dalam sebuah kelompok menjadi hal penting dalam sebuah program pemberdayaan mengingat pemberdayaan tanpa institusi akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan komando organisasi masyarakat itu sendiri. Cita-cita pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat tidak akan pernah tercapai tanpa proses institusionalisasi, meskipun dalam bentuk yang sederhana (Mahasin, 2009). Kelompok ini memberikan wadah bagi nelayan untuk mencurahkan kondisi, kebutuhan, permasalahan dan harapan yang dimilikinya secara bebas. Selanjutnya, melalui musyawarah mereka menentukan langkah apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sementara program hanyalah sebagai fasilitator.

Program Pemberdayaan sebagai Fasilitator

Untuk melakukan fungsi fasilitator ini, maka program memberikan seorang pendamping yang bertugas untuk memandu proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok, menghubungkan antara kelompok dengan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program, dan membantu menggerakkan aktivitas kelompok agar lebih produktif dan berkelanjutan.



seorang pendamping harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya dan membantu masyarakat merancang penyelesaiannya melalui program-program kerja yang bersifat komprehensif, visioner dan tuntas. Namun, seperti apa yang dikatakan dibagian pendahuluan bahwa keberhasilan sebuah program pemberdayaan sangat tergantung pada akar permasalahan kemiskinannya. Akar kemiskinan nelayan sangat bersifat lokalitas, sehingga sebuah program pemberdayaan yang berhasil di suatu daerah tidak selalu berhasil untuk daerah lain.

Hal-Hal yang tidak termasuk dalam program PEMP

Kekurangan program PEMP dari segi tataran konseptual.

Memperhatikan tujuan dan sasarannya, program PEMP seharusnya mampu menciptakan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan yang memadai dan berkelanjutan. Karena sasaran yang ditentukan telah selaras dengan konsep memutus rantai kemiskinan nelayan yang ditawarkan Satria (2009). Karena sasaran yang ditentukan telah selaras dengan konsep memutus rantai kemiskinan nelayan yang ditawarkan Satria (2009) yaitu: pertama, Strategi mata pencaharian. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan dalam strategi ini yaitu mengembangkan strategi nafkah ganda baik disektor kelautan dan perikanan maupun di luar sektor kelautan dan perikanan, mendorong ke laut lepas dan mengembangkan diversifikasi alat tangkap. strategi permodalan. Mengingat usaha penangkapan penuh dengan ketidakpastian, LEPP-M3 hasil bentukan PEMP diharapkan mampu berperan lebih baik dibandingkan tengkulak dalam mengatasi ketidakpastian tersebut. Tidak terpenuhinya strategi makro dalam program PEMP, merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya target keberhasilan yang diharapkan. Penyebab lainnya bisa dilihat dengan menganalisa konsep "berkelanjutan" yang merupakan salah satu prinsip manajemen program PEMP.

Kekurangan program PEMP dalam tataran praktis.

kasus di beberapa daerah mengindikasikan bahwa penyaluran dana PEMP menyalahi aturan, dimana ada beberapa pihak yang bukan nelayan dan masyarakat pesisir memperoleh dana bergulir tersebut. Padahal masih banyak nelayan maupun masyarakat pesisir membutuhkannya. Faktor penyebab diatas hanya merupakan salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan PEMP. Ada beberapa hal lain yang menjadikan upaya pemberdayaan nelayan ini belum mampu mencapai target yang harapkan, yaitu:

1. Beberapa masyarakat pengguna menganggap bahwa dana dari program bersifat gratis. Persepsi ini mempengaruhi tingkat pengembalian kredit.
2. Kurangnya pengetahuan dalam manajemen dan administrasi keuangan (Ramadan, 2009).



3. Keterbatasan kemampuan orang miskin dalam segi keuangan menuntut mereka memberikan pilihan menggunakan dana modal usaha untuk kebutuhan yang mendesak misalnya anak sakit parah dan lainlain, sehingga perlu disediakan dana penyangga yang include dengan dana bantuan program.
4. Banyak sekali Program Pemberdayaan yang dilaksanakan di suatu daerah yang berasal dari berbagai macam departemen, LSM dan Swasta dengan agenda perberdayaannya masing-masing, namun tidak ada upaya untuk melakukan sinkronisasi sehingga program tidak membuahkan hasil yang optimal.
5. Aplikasi program pemberdayaan sering tidak dikerangkai oleh struktur sosial budaya lokal, baik yang berhubungan dengan masalah institusi mapun dengan sistem pembagian kerja yang berlaku dalam masyarakat nelayan setempat karena karakteristik masyarakat dan sumberdaya serta permasalahan yang ada di wilayah pesisir sangat complicated dan spesifik antar antar daerah.
6. Program pemberdayaan sering diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif dan fisik semata akan menciptakan eksternalitas negatif di sektor kelautan dan perikanan, seperti kemiskinan lingkungan sumber daya pesisir dan laut (Kusnadi, 2005).

KESIMPULAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan proses pembelajaran yang cukup mahal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) sebagai sarana yang meneruskan upaya pemberdayaan ini hendaknya benar-benar mengambil pelajaran dari kekurangan-kekurangan PEMP agar tidak menjadi sebuah 'program pengentasan kemiskinan tanpa pemberdayaan'. Upaya PNPM-KP untuk mengintegrasikan program pemberdayaan pada berbagai Direktorat Jenderal dalam satu wadah memang merupakan hal yang penting dilakukan, namun masih banyak lagi kekurangan-kekurangan program terdahulu yang mesti dipenuhi dalam program ini agar mencapai tujuan yang diinginkan. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah, seperti apapun konsep strategi yang diagendakan oleh suatu proses pemberdayaan tidak akan berhasil jika sektor kelautan dan perikanan tidak menjadi pertimbangan dalam strategi makro kebijakan strategis nasional. Dalam hal ini peran DPR sebagai pembuat dan perumus Undang-Undang perlu memiliki political will yang fokus kepada kepentingan dan keberlanjutan masyarakat pesisir. Dengan demikian, produk perundang-undangan yang dibuat tidak serta merta menjadikan masyarakat pesisir tercabut dari hak-haknya sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan warga dari komunitas yang lain.



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami berikan kepada segenap pihak yang telah bersedia membantu proses penelitian segenap tim ahli yang juga telah memberikan masukan demi kekritisan dan kualitas hasil dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7642/. Diakses pada 12 Juni 2009
- Bates-Eamer, Nicole, Barry Carin, Min Ha Lee, Wohyunk Lim, and Mukesh Kapila. 2012. *Post 2015 Development: Goals, Targets and Indicators*. Special Report, The Center for International Governance Innovation and the Korea Development Institute.
- Boone, Louis E. and David L. Kurtz. 2011. *Contemporary Business, International Student Version, 14th edition*. John Wiley & Sons. Asia.
- Case, Karl E., Ray C. Fair, and Sharon M. Oster. 2009. *Principles of Economics*. Pearson Education.
- Chambers, R. 1987. *Membangun Dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.
- Colander, David C. 1998. *Macroeconomics, Third edition*. The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Ebert, Ronald J. and Ricky W. Griffin. 2013. *Business Essentials, Ninth edition*. Pearson Education Limited.
- Empat Undang-Undang yang Menggerus Masyarakat Pesisir. <http://commit-indonesia.blogspot.com/2008/02/empat-uu-yangmenggerus-masyarakat.html>. Diakses pada 22 Januari 2010.
- Hill, Hal. 1997. *Indonesia's Industrial Transformation*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.
- Hisrich, Robert D, Michael P. Peters, and Dean A. Shepherd. 2008. *Entrepreneurship, Seventh edition*. McGraw-Hill. Irwin.
- Kajian Kebijakan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8203/. Diakses pada 12 Juni.
- Karim M. 2009. Hari Nelayan dan system ekonomi tengkulak. <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomibisnis/2885-hari-nelayan-dan-sistem-ekonomitengkulak.html>. Diakses pada 13 februari 2010.
- Kasali, Rhenald. 2012. *Cracking Values: Bersih, Bersinar, dan Kompetitif*. PT Gramedia. Jakarta.
- Kendala dan Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. <http://kendariexpres.com/content/view/2909/32/>. Diakses pada 12 Juni 2010.



- Kindangen, Paulus dan Carolus P. Paruntu. 2015. Poverty Reduction in Indonesia: A Challenge Facing Asean Economic Community. *Journal of ASEAN Studies on Maritime Issues* (1)1: 2477 – 6319
- Kindangen, Paulus dan Johan Tumiwa. 2013. Kewirausahaan dan Pendapatan Rumah Tangga di Kotamobagu dan Bolaang Mongondow. *Laporan Penelitian*. Lembaga Penelitian Universitas Sam Ratulangi
- Kindangen, Paulus dan Johan Tumiwa. 2015. Kewirausahaan dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 2(2)
- Kritikos, Alexander S. 2014. *Entrepreneurs and Their Impact on Jobs and Economic Growth, Productive entrepreneurs can invigoratethe economy by creating jobs and new technologies, and increasing productivity*. IZA World of Labor.
- Kuratko, Donald F. and Richard M. Hodgetts. *Entrepreneurship A Contemporary Approach, Fourth edition*. The Dryden Press.
- Kusnadi, 2005. Pemahaman dan Anatomi Kemiskinan Nelayan: Peluang dan Strategi Penanggulangannya. *Makalah yang disampaikan dalam Seminar Upaya Perumusan Langkah Bersama Penanggulangan Kemiskinan Nelayan, PRPPSE-DKP Departemen Kelautan dan Perikanan*, Jakarta, 24 Agustus 2005.
- Mahasin, Z. 2009. PEMP Teramputasi Birokrasi Keuangan. <http://www.kmsgroups.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=21>. Diakses pada 13 Juli 2010.
- Miller, Roger LeRoy. 2010. *Economics Today, Fifteenth edition*. Pearson Education.
- Moeljarto, V. 1996. *Pemberdayaan Kelompok Misin melalui program IDT dalam Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi penyunting Onny S Prijono dan AMW Pranaka*. Centre For Strategic and International Studies. Jakarta.
- Nasdian, F. T. 2009. *Penanggulangan kemiskinan tanpa pemberdayaan. Materi Kuliah Sosiologi Kemiskinan*. PS Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nasution, Arman Hakim, Bustanul Arifin Noer, dan Mokhammad Suf. 2001. *Membangun Spirit Entrepreneur Muda Indonesia, Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. PT Elex Media Komputindo.
- Oghojafor, Ben E. Akpoyomare, Olufemi O. Olayemi, Patrick Sunday Okonji, and Peter O. Olayiwola. 2011. Entrepreneurship as an Invention Strategy to Poverty alleviation in Developing Economy. *10th International Forum, Tamkeen, Bahrain (9-11 January)*
- Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld. 2009. *Microeconomics, Seventh edition*. Pearson Education.
- Prianto, Agus. 2012. Identifikasi Berbagai Faktor Pemicu Orientasi kewirausahaan (Studi pada Para Pengusaha di Empat Kota di Jawa Timur). *Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia* 41(3)
- Ramadan, L.O.M. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Universitas Jember dengan ar-Ruzz Media. Jember.



- Romer, David. 2012. *Advanced Macroeconomics, Fourth Edition*. McGraw-Hill.
- Satria A. 2009. *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*. IPB Press. Bogor.
- Smith, Daniel. 2010. The Role of Entrepreneurship in Economic Growth. *Undergraduate Economic Review* 6(7): 1 – 17 pp.
- Sumadi Pungky. 2009. Mengkaji Kebijakan Pro- poor masa lalu dan masa kini. <http://sutardjo70.wordpress.com/>. Diakses pada 12 Juni 2010.
- Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*, Terjemahan Haris Munandar dan Wisnu C. Kristiaji. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Zanden, JL van, dan Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010 Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Penerbit Buku KOMPAS. Jakarta.